

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengendalian intern terhadap SAKIP (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI), maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyelenggarakan SAKIP yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan, reviu dan evaluasi Kinerja . Sepatutnya Sekda Kabupaten OKI mampu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui pengamanan aset negara maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan menuju tata kelola yang baik.
- 2) SAKIP pada Sekda Kabupaten OKI sudah berjalan sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan, unsur sAKIP: Rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sudah terlaksana dengan baik. Pencapaian Kinerja dan Strategi Organisasi pada Setda Kabupaten OKI melampaui target kinerja dan laporan LPPD tahun 2019 mendapat predikat tinggi dari kementerian dalam negeri.
- 3) Rencana Strategis pada Sekda telah diterapkan yang diterapkan kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

- 4) Perjanjian kinerja sudah diterapkan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dalam pasal 8 yang berbunyi perjanjian kinerja, dengan bunyi setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dengan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja. Setda Kabupaten OKI sangat berkomitmen dalam menerapkan SAKIP. Implementasi SAKIP memberikan kontribusi yang baik bagi Setda Kabupaten OKI dalam menciptakan prinsip *good governance* (kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan kemandirian).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada butir 5.1, maka saran yang dapat diberikan penulis kepada setda Kabupaten OKI:

- 1) Sekda Kabupaten OKI sebaiknya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan penerapan dan pengembangan SPIP dan LAKIP serta melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah yang baik.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah, sebaiknya sekda mengadakan suatu pelatihan dan *workshop* atau sejenisnya guna meningkatkan pemahaman tentang SPIP dan LAKIP agar selanjutnya laporan kinerja dihasil yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif dan akuntabel.
- 3) Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah unit analisis (unit observasi) pada perangkat-perangkat daerah lainnya diluar sekda, dan memperimbangkan faktor-faktor lain yang diteliti agar hasil yang diharapkan lebih representatif dan tergeneralisasi.

